



Katalog BPS : 7203005.34

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH

## REGIONAL FINANCIAL STATISTICS

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
*Daerah Istimewa Yogyakarta Province*

# 2010-2011



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH**  
*REGIONAL FINANCIAL STATISTICS*  
**PROVINSI D.I.YOGYAKARTA**  
*D.I.YOGYAKARTA PROVINCE*  
**2010-2011**

ISSN : 0126.4133

No. Katalog BPS/ *Catalog Number* : 7203005.34

No. Publikasi/ *Publication Number* : 34542.12.06

Jumlah Halaman / *Number of pages* : vii + 53 Halaman / *Pages*

Penyunting/ *Editor* :

1. Ir. Haryono, M.Si.
2. Santi Wijayanti, S.Si.

Naskah/ *Manuscript* :

Paulus Henri Laksono, SST

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen  
*Financial and Producer Price Statistics Subdivision*

Gambar Kulit/ *Cover Design*  
Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen  
*Financial and Producer Price Statistics Subdivision*

Diterbitkan oleh/ *Published by* :

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*BPS – Statistics of D.I. Yogyakarta Province*

Boleh Dikutip dengan menyebutkan sumbernya.  
*May be cited with reference to the source.*

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2010-2011 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2010 dan APBD 2011 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari para pemakai sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2012

Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
K e p a l a,

Ir. Wien Kusdiatmono, M.M  
NIP. 19561120 197903 1 001

## **P R E F A C E**

*The publication of Regional Financial Statistics of Regional Government of D.I. Yogyakarta Province 2010-2011 is the continuation of previous publications published by BPS–Statistics of D.I. Yogyakarta Province. This book consists of data about The D.I. Yogyakarta Province and Regency/Municipality Regional Government’s actual revenues and expenditures.*

*We hope that this publication gives significant contributions to the Regional Financial of Regional Government information in D.I. Yogyakarta Province. Comments and suggestions to improve the contents of this publication are always be welcomed. We would like to express our sincere thanks to those who have contributed to make this publication was released.*

*Yogyakarta, August 2012  
BPS – Statistics of  
Daerah Istimewa Yogyakarta Province  
H e a d,*

*Ir. Wien Kusdiatmono, M.M  
NIP. 19561120 197903 1 001*

## DAFTAR ISI / *List of Contents*

KATA PENGANTAR / <i>PREFACE</i> .....	i
DAFTAR ISI / <i>List of Contents</i> .....	iii
<b>I. PENJELASAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	1
1.3. Konsep dan Definisi .....	2
<b>II. ULASAN RINGKAS</b> .....	<b>6</b>
Tabel-Tabel / <i>Tables</i>	
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 .....	7
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 .....	10
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011 .....	11
4. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	13
5. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 .....	14
6. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 .....	15
7. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010.....	16
8. Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 .....	17

1.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011</i> ( 000 Rp). .....	18
1.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2010-2011</i> ( 000 Rp).....	19
1.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2010-2011</i> (000 Rp). .....	20
1.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011</i> (Persen/Percent). .....	21
1.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2010-2011</i> (Persen/Percent). .....	22
1.6.	Persentase Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2010-2011</i> (Persen/Percent). .....	23
2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011</i> ( 000 Rp). .....	24
2.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2010-2011</i> (000 Rp).....	25
2.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2010-2011</i> (000 Rp).....	26
2.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011</i> (Persen/Percent). .....	27
2.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2010-2011</i> (Persen/Percent). .....	28

2.6.	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	29
3.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	30
3.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	31
3.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	32
3.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	33
3.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	34
3.6.	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	35
4.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	36
4.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	37
4.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	38
4.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Gunungkidul</i>	

	<i>Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	39
4.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> . ....	40
4.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> .....	41
5.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 ( 000 Rp)</i> .....	42
5.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	43
5.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	44
5.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> . ....	45
5.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> . ....	46
5.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)</i> . ....	47
6.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 ( 000 Rp)</i> . ....	48
6.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2010-2011 (000 Rp)</i> .....	49



6.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2010-2011</i> (000 Rp).....	50
6.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011</i> (Persen/Percent).....	51
6.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2010-2011</i> (Persen/Percent).....	52
6.6	Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2010-2011</i> (Persen/Percent).....	53

## I. PENJELASAN UMUM

### I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

### I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.  
Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.

## 2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

### **I.3. Konsep dan Definisi**

#### **I.3.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **1.1. Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

## **1.2. Retribusi Daerah**

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

## **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

## **1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

## **2. Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **2.1. Bagi Hasil Pajak.**

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

### **2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.**

Pendapatan Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### **2.3. Dana Alokasi Umum.**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

### **2.4. Dana Alokasi Khusus.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## **I.3.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

### **1. Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

### **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

## **II. ULASAN RINGKAS ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BERDASAR REALISASI APBD 2010 DAN APBD 2011**

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimisasikan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam Tabel 1. dapat dilihat gambaran perbandingan luas wilayah, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010.

**Tabel 1.**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Persentase Surplus/(Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.374.205,10	1.354.594,06	1,01	1,43
Kab. Kulonprogo	633.088,92	612.902,63	1,03	3,19
Kab. Bantul	986.866,90	1.012.356,85	0,97	(2,58)
Kab. Gunungkidul	798.248,88	765.190,19	1,04	4,14
Kab. Sleman	1.095.628,89	1.131.602,40	0,97	(3,28)
Kota Yogyakarta	815.495,92	839.866,48	0,97	(3,00)

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2010 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan kabupaten yang belum dapat mencukupi kebutuhan belanja daerahnya pada tahun 2010 adalah



Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka rasio pendapatan terhadap belanjanya yang kurang dari satu.

Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 1.374,20 milyar rupiah dengan total pembelanjaan Pemerintah Provinsi mencapai besaran 1.354,59 milyar rupiah. Dengan demikian pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami surplus keuangan sekitar 1,43 persen.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1.095,63 milyar rupiah. Meski demikian pos belanja yang dikeluarkan juga terbesar dengan nilai 1.131,60 milyar rupiah, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2010 mengalami defisit keuangan sebesar 3,28 persen dari pendapatan yang diterima. Hal tersebut juga menjadikan persentase defisit Kabupaten Sleman adalah yang terbesar di Provinsi DI Yogyakarta pada Tahun 2010.

Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2010 yang terendah diterima oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 633,09 milyar rupiah. Kabupaten Kulonprogo menggunakan anggaran sebesar 612,90 milyar untuk belanja daerah pada tahun 2010 sehingga mengalami surplus sebesar 3,19 persen dari pendapatan yang diterima.

Sedangkan kabupaten yang mengalami persentase surplus terbesar pada tahun 2010 adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu mencapai 4,14 persen dari pendapatan yang diterima sebesar 798,25 milyar rupiah.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut UU no 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 relatif besar mencapai 53,86 persen dari total pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Persentase PAD terhadap belanja daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Besar persentase PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta juga cukup besar. Lebih dari separuh (54,64

persen) dari belanja daerah pada tahun 2010 dapat dicukupi dengan PAD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sedangkan sumbangan PAD masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap**  
**Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.374.205,10	1.354.594,06	740.202,08	53,86	54,64
Kab. Kulonprogo	633.088,92	612.902,63	48.280,64	7,63	7,88
Kab. Bantul	986.866,90	1.012.356,85	81.637,10	8,27	8,06
Kab. Gunungkidul	798.248,88	765.190,19	42.542,03	5,33	5,56
Kab. Sleman	1.095.628,89	1.131.602,40	163.056,46	14,88	14,41
Kota Yogyakarta	815.495,92	839.866,48	179.423,64	22,00	21,36

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, hanya ada dua kabupaten/kota yang sumbangan PAD-nya diatas 10 persen, yakni Kota Yogyakarta dengan sumbangan PAD sebesar 22,00 persen dan Kabupaten Sleman sebesar 14,88 persen. Sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul sumbangan PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil (dibawah 10 persen).

Upaya peningkatan PAD oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, dimana sebagian besar kabupaten/kota berencana akan meningkatkan jumlah maupun persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya. Kabupaten Bantul merencanakan kenaikan persentase PAD terhadap pendapatannya menjadi 11,86 persen pada tahun 2011 yang di tahun sebelumnya hanya

mencapai 8,27 persen saja. Demikian pula untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terus merencanakan kenaikan persentase PAD pada rancangan anggarannya di tahun 2011, dari 14,88 persen dan 22,00 persen di tahun 2010 menjadi 15,98 persen dan 25,44 persen di tahun 2011. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul tidak merencanakan kenaikan persentase PAD nya di tahun 2011.

**Tabel 3**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011**

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I. Yogyakarta	1.419.475,10	1.590.785,71	700.339,19	49,34	44,02
Kab. Kulonprogo	654.775,80	682.291,11	49.588,46	7,57	7,27
Kab. Bantul	900.867,64	908.389,35	106.885,12	11,86	11,77
Kab. Gunungkidul	843.349,76	929.749,70	41.985,40	4,98	4,52
Kab. Sleman	1.272.583,65	1.376.859,03	203.416,68	15,98	14,77
Kota Yogyakarta	795.008,14	889.772,13	202.260,82	25,44	22,73

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan investasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi).

Dana Perimbangan bagi Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam tabel lampiran 1.2 poin II.2.1 yakni pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 87,82 milyar rupiah, atau sekitar 6,39 persen dari total pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Dana Perimbangan untuk pemda kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri dari pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak persentase terhadap total pendapatan tahun 2010 berkisar antara 4-9 persen. Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26 persen) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10 persen) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90 persen) dibagi ke kabupaten/kota.

**Tabel 4**  
**Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut**  
**Undang-undang nomor 33 Tahun 2004**

Jenis Pungutan	Pemerintah (Persen)	Provinsi Bersangkutan (Persen)	Kabupaten /kota Penghasil (Persen)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB <sup>1)</sup>	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan <sup>2)</sup>	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan : <sup>1)</sup> 9 % untuk biaya pemungutan

<sup>2)</sup> 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Pada tahun 2010 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 527,47 milyar rupiah atau mencapai 38,38 persen dari pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta didapat dari alokasi DAU. Besaran ini mampu mencukupi 38,94 persen dari belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010.

**Tabel 5**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap**  
**Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi D.I.Yogyakarta	1.374.205,10	1.354.594,06	527.471,247	38,38	38,94
Kab. Kulonprogo	633.088,92	612.902,63	411.293,618	64,97	67,11
Kab. Bantul	986.866,90	1.012.356,85	573.512,337	58,11	56,65
Kab. Gunungkidul	798.248,88	765.190,19	521.293,704	65,30	68,13
Kab. Sleman	1.095.628,89	1.131.602,40	563.320,892	51,42	49,78
Kota Yogyakarta	815.495,92	839.864,48	395.444,062	48,49	47,08

Sampai tahun ke-10 diberlakukannya otonomi daerah, sumbangan DAU bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih besar. Antara 48-65 persen pendapatan pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta diperoleh dari DAU, sementara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 sektor ini malah meningkat persentasenya, yaitu antara 49-69 persen. Dengan kondisi seperti itu,

tentunya pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sekali lagi masih perlu meningkatkan PAD nya agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

**Tabel 6**  
**Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi D.I.Yogyakarta	1.419.475,10	1.590.785,71	620.812,33	43,74	39,03
Kab. Kulonprogo	654.775,80	682.291,11	444.247,74	67,85	65,11
Kab. Bantul	900.867,64	908.389,35	625.350,00	69,42	68,84
Kab. Gunungkidul	843.349,76	929.749,70	572.300,00	67,86	61,55
Kab. Sleman	1.272.583,65	1.376.859,03	631.920,66	49,66	45,90
Kota Yogyakarta	795.008,14	889.772,13	436.339,93	54,88	49,04

Untuk memenuhi kebutuhan daerah, sumber dana selain dari PAD, DAU, dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan dari Provinsi) bisa didapatkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pinjaman pemerintah di atasnya.

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2010 menghabiskan dana 788,49 milyar rupiah (58,21 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2010 sebagian besar masih digunakan untuk pos Belanja Tidak Langsung.

**Tabel 7**  
**Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2010**

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I.Yogyakarta	788.491,84	58,21	566.102,21	41,79
Kab. Kulonprogo	473.959,88	77,33	138.942,75	22,67
Kab. Bantul	725.484,52	71,66	286.872,33	28,34
Kab. Gunungkidul	620.545,03	81,10	144.645,15	18,90
Kab. Sleman	782.307,30	69,13	349.295,10	30,87
Kota Yogyakarta	535.464,15	63,76	304.402,33	36,24

Namun indikasi positif dapat terlihat di tahun 2011, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun tersebut ada 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang merencanakan penurunan persentase belanja tidak langsung sekaligus menaikkan persentase belanja langsungnya. Penurunannya pun cukup signifikan, yaitu dari kisaran 63-77 persen menjadi hanya 59-74 persen. Hanya Kabupaten Bantul yang masih belum merencanakan penurunan belanja tidak langsung dalam rancangan anggarannya di tahun 2011.

**Tabel 8**  
**Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Pemerintah Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2011**

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi D.I.Yogyakarta	849.118,42	53,38	741.667,29	46,62
Kab. Kulonprogo	505.191,97	74,04	177.099,14	25,96
Kab. Bantul	670.158,26	73,77	238.231,10	26,23
Kab. Gunungkidul	673.744,38	72,47	256.005,31	27,53
Kab. Sleman	909.074,26	66,03	467.784,77	33,97
Kota Yogyakarta	531.226,65	59,70	358.545,48	40,30

# TABEL-TABEL

<https://yogyakartabps.go.id>

**Tabel/Table 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi  
D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Realization of D.I. Yogyakarta  
Province Government's Receipts and Expenditures, 2010-2011  
(000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>1.374.205.096</b>	<b>1.419.475.100</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	740.202.076	700.339.192
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	626.677.339	714.542.343
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	7.325.681	4.593.565
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>1.354.594.058</b>	<b>1.590.785.711</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	788.491.846	849.118.418
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	566.102.212	741.667.293
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>19.611.038</b>	<b>(171.310.611)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>212.465.503</b>	<b>171.310.611</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>740.202.076</b>	<b>700.339.192</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	634.710.019	592.498.872
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	34.116.476	37.709.418
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	26.333.870	30.557.391
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	45.041.711	39.573.511
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>626.677.339</b>	<b>714.542.343</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	87.821.992	74.240.415
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	527.471.247	620.812.328
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	11.384.100	19.489.600
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>7.325.681</b>	<b>4.593.565</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>1.374.205.096</b>	<b>1.419.475.100</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Realization of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2010-2011**  
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>788.491.846</b>	<b>849.118.418</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	335.693.915	443.439.504
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	19.464	0
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	89.895.292	7.618.834
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	88.513.100	105.752.387
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa/ Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	214.667.402	215.127.693
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	56.967.000	67.180.000
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	2.735.672	10.000.000
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>566.102.212</b>	<b>741.667.293</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	88.552.560	90.164.079
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	350.086.540	501.329.695
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	107.069.020	150.173.519
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>1.354.594.058</b>	<b>1.590.785.711</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 1.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	53.86	49.34
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	45.60	50.34
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	0.53	0.32
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	58.21	53.38
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	41.79	46.62

\*) Data APBD

**Tabel/Table 1.5** **Persentase Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>53.86</b>	<b>49.34</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	46.19	41.74
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2.48	2.66
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1.92	2.15
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	3.28	2.79
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>45.60</b>	<b>50.34</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	6.39	5.23
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	38.38	43.74
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	0.83	1.37
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>0.53</b>	<b>0.32</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD



**Tabel/Table 1.6 Persentase Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of D.I. Yogyakarta Province Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>58.21</b>	<b>53.38</b>
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	24.78	27.88
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0.00	0.00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	6.64	0.48
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	6.53	6.65
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	15.85	13.52
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	4.21	4.22
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0.20	0.63
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>41.79</b>	<b>46.62</b>
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	6.54	5.67
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	25.84	31.51
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	7.90	9.44
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>633.088.919</b>	<b>654.775.796</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	48.280.641	49.588.455
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	485.094.125	515.782.023
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	99.714.153	89.405.318
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>612.911.631</b>	<b>682.291.108</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	473.959.883	505.191.967
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	138.951.748	177.099.141
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>20.177.288</b>	<b>(27.515.312)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>42.504.591</b>	<b>27.515.312</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2010-2011**  
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>48.280.641</b>	<b>49.588.455</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	4.310.295	4.221.988
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	7.727.507	9.519.209
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	4.740.518	5.411.132
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	31.502.321	30.436.126
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>485.094.125</b>	<b>515.782.023</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	32.186.407	23.190.385
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	411.293.618	444.247.738
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	41.614.100	48.343.900
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>99.714.153</b>	<b>89.405.318</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>633.088.919</b>	<b>654.775.796</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2010-2011**  
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>473.959.883</b>	<b>505.191.967</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	435.822.712	453.881.452
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	62.579	78.954
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	8.043.896	15.440.999
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	8.000.502	9.969.658
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1.972.846	1.338.890
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	19.896.534	22.982.014
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	160.814	1.500.000
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>138.951.748</b>	<b>177.099.141</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	25.665.997	28.481.992
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	66.694.662	71.524.450
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	46.591.089	77.092.699
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>612.911.631</b>	<b>682.291.108</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	7.63	7.57
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	76.62	78.77
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	15.75	13.65
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	77.33	74.04
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	22.67	25.96

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>7.63</b>	<b>7.57</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0.68	0.64
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1.22	1.45
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0.75	0.83
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	4.98	4.65
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>76.62</b>	<b>78.77</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	5.08	3.54
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	64.97	67.85
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6.57	7.38
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>15.75</b>	<b>13.65</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 2.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2010-2011 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>77.33</b>	<b>74.04</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	71.11	66.52
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0.01	0.01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	1.31	2.26
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1.31	1.46
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0.32	0.20
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	3.25	3.37
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0.03	0.22
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>22.67</b>	<b>25.96</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	4.19	4.17
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	10.88	10.48
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	7.60	11.30
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>986.866.902</b>	<b>900.867.639</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	81.637.099	106.885.124
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	688.676.567	707.595.997
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	216.553.236	86.386.518
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>1.012.902.847</b>	<b>908.389.354</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	725.484.516	670.158.257
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	287.418.331	238.231.097
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(26.035.945)</b>	<b>(7.521.715)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>60.597.692</b>	<b>7.521.715</b>

\*) Data APBD



**Tabel/Table 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>81.637.099</b>	<b>106.885.124</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	16.541.250	28.752.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	15.978.422	21.452.299
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	7.424.932	7.546.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	41.692.495	49.134.825
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>688.676.567</b>	<b>707.595.997</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	54.598.730	36.320.597
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	573.512.337	625.350.000
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	60.565.500	45.925.400
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>216.553.236</b>	<b>86.386.518</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>986.866.902</b>	<b>900.867.639</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 /  
Realization of Bantul Regency Government's Expenditures,  
in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>725.484.516</b>	<b>670.158.257</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	640.523.590	595.336.223
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	65.235	120.145
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	17.408.154	10.555.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	32.612.762	33.345.375
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1.776.309	2.006.742
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	29.751.529	27.294.789
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	3.346.937	1.499.983
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>287.418.331</b>	<b>238.231.097</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	50.880.694	49.275.021
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	112.742.357	98.024.088
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	123.795.280	90.931.988
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>1.012.902.847</b>	<b>908.389.354</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 3.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	8.27	11.86
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	69.78	78.55
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	21.94	9.59
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	71.62	73.77
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	28.38	26.23

\*) Data APBD

**Tabel/Table 3.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2010-2011**

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>8.27</b>	<b>11.86</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	1.68	3.19
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1.62	2.38
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0.75	0.84
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	4.22	5.45
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>69.78</b>	<b>78.55</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	5.53	4.03
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	58.11	69.42
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6.14	5.10
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>21.94</b>	<b>9.59</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 3.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 / Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011**  
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>71.62</b>	<b>73.77</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	63.24	65.54
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0.01	0.01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	1.72	1.16
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	3.22	3.67
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0.18	0.22
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2.94	3.00
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0.33	0.17
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>28.38</b>	<b>26.23</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	5.02	5.42
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	11.13	10.79
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	12.22	10.01
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Realization of Gunungkidul Regency  
Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011  
(000 Rp)**

<b>No.</b>	<b>Rincian / Classification</b>	<b>2010</b>	<b>2011 *)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>798.248.876</b>	<b>843.349.756</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	42.542.032	41.985.405
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	633.692.367	664.560.733
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	122.014.477	136.803.617
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>765.190.187</b>	<b>929.749.695</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	620.545.035	673.744.383
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	144.645.152	256.005.311
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(33.058.689)</b>	<b>(86.399.939)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>57.222.493</b>	<b>86.399.939</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>42.542.032</b>	<b>41.985.405</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	5.948.839	7.128.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	25.079.536	8.656.638
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	4.731.777	4.293.412
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6.781.880	21.907.355
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>633.692.367</b>	<b>664.560.733</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	34.824.463	33.092.029
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	521.293.704	572.300.004
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	77.574.200	59.168.700
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>122.014.477</b>	<b>136.803.617</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>798.248.876</b>	<b>843.349.756</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011**  
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>620.545.035</b>	<b>673.744.383</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	547.852.086	601.385.512
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	51.613	43.500
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	9.245.564	1.709.550
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	19.859.301	23.531.952
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	3.140.003	3.240.323
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	39.839.280	42.484.206
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	557.187	1.349.340
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>144.645.152</b>	<b>256.005.311</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	28.519.669	27.984.927
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	69.124.354	84.879.571
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	47.001.128	143.140.813
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>765.190.187</b>	<b>929.749.695</b>

\*) Data APBD



**Tabel/Table 4.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	5.33	4.98
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	79.39	78.80
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	15.29	16.22
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	81.10	72.47
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	18.90	27.53

\*) Data APBD

**Tabel/Table 4.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>5.33</b>	<b>4.98</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0.75	0.85
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	3.14	1.03
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0.59	0.51
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	0.85	2.60
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>79.39</b>	<b>78.80</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	4.36	3.92
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	65.30	67.86
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	9.72	7.02
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>15.29</b>	<b>16.22</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 4.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>81.10</b>	<b>72.47</b>
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	71.60	64.68
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0.01	0.00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	1.21	0.18
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	2.60	2.53
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0.41	0.35
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	5.21	4.57
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0.07	0.15
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>18.90</b>	<b>27.53</b>
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	3.73	3.01
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	9.03	9.13
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	6.14	15.40
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>1.095.628.888</b>	<b>1.272.583.653</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	163.056.459	203.416.684
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	740.198.028	737.072.792
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	192.374.400	332.094.177
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>1.131.602.399</b>	<b>1.376.859.031</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	782.307.301	909.074.257
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	349.295.098	467.784.774
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(35.973.511)</b>	<b>(104.275.378)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>147.387.382</b>	<b>104.275.378</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2010-2011 (000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>163.056.459</b>	<b>203.416.684</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	80.611.543	122.700.165
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	59.110.504	30.068.639
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	10.169.825	11.027.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	13.164.588	39.620.879
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>740.198.028</b>	<b>737.072.792</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	107.029.836	62.501.829
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	563.320.892	631.920.663
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	69.847.300	42.650.300
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>192.374.400</b>	<b>332.094.177</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>1.095.628.888</b>	<b>1.272.583.653</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>782.307.301</b>	<b>909.074.257</b>
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	688.994.947	797.031.957
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	77.980	144.000
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0	0
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	18.413.622	37.714.827
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	32.161.756	32.667.194
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	19.528.558	19.693.062
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	18.726.347	20.818.935
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	4.404.090	1.004.281
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>349.295.098</b>	<b>467.784.774</b>
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	66.843.297	91.357.793
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	182.639.532	230.691.105
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	99.812.269	145.735.877
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>1.131.602.399</b>	<b>1.376.859.031</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 5.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	14.88	15.98
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	67.56	57.92
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	17.56	26.10
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	69.13	66.03
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30.87	33.97

\*) Data APBD

**Tabel/Table 5.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2010-2011**  
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>14.88</b>	<b>15.98</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	7.36	9.64
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	5.40	2.36
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0.93	0.87
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	1.20	3.11
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>67.56</b>	<b>57.92</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	9.77	4.91
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	51.42	49.66
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6.38	3.35
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>17.56</b>	<b>26.10</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD



**Tabel/Table 5.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2011 / Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>69.13</b>	<b>66.03</b>
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	60.89	57.89
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0.01	0.01
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	1.63	2.74
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	2.84	2.37
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	1.73	1.43
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	1.65	1.51
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0.39	0.07
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>30.87</b>	<b>33.97</b>
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	5.91	6.64
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	16.14	16.75
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	8.82	10.58
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>815.495.925</b>	<b>795.008.137</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	179.423.640	202.260.820
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	484.628.283	499.559.652
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	151.444.002	93.187.665
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>839.956.481</b>	<b>889.772.129</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	535.464.146	531.226.648
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	304.492.335	358.545.481
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(24.460.556)</b>	<b>(94.763.992)</b>
	<b>Pembiayaan Netto / Cost</b>	<b>99.343.226</b>	<b>94.763.992</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>179.423.640</b>	<b>202.260.820</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	78.254.579	99.900.500
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	32.214.651	32.611.090
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	11.031.305	11.031.305
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	57.923.105	58.717.925
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>484.628.283</b>	<b>499.559.652</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	75.585.121	61.457.619
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	395.444.062	436.339.933
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	13.599.100	1.762.100
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>151.444.002</b>	<b>93.187.665</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>815.495.925</b>	<b>795.008.137</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 /  
Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in  
2010-2011**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>535.464.146</b>	<b>531.226.648</b>
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	467.904.710	439.225.793
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	379.637	235.379
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	30.530.576	48.093.536
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	35.339.698	35.671.940
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	1.309.524	8.000.000
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>304.492.335</b>	<b>358.545.481</b>
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	91.242.264	96.246.639
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	159.209.639	190.946.849
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	54.040.432	71.351.993
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>839.956.481</b>	<b>889.772.129</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2010-2011 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah / Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah / <i>Local Original Receipts</i>	22.00	25.44
1.2	Dana Perimbangan / <i>Balancing Funds</i>	59.43	62.84
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / <i>Other Receipts</i>	18.57	11.72
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah / Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung / <i>Indirect Expenditures</i>	63.75	59.70
2.2	Belanja Langsung / <i>Direct Expenditures</i>	36.25	40.30

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2010-2011**

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts</b>	<b>22.00</b>	<b>25.44</b>
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	9.60	12.57
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	3.95	4.10
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1.35	1.39
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	7.10	7.39
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan / Balancing Funds</b>	<b>59.43</b>	<b>62.84</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	9.27	7.73
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	48.49	54.88
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	1.67	0.22
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts</b>	<b>18.57</b>	<b>11.72</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

**Tabel/Table 6.6 Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011 / Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2010-2011**  
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures</b>	<b>63.75</b>	<b>59.70</b>
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	55.71	49.36
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0.05	0.03
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0.00	0.00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	3.63	5.41
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	4.21	4.01
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0.00	0.00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0.00	0.00
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0.16	0.90
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures</b>	<b>36.25</b>	<b>40.30</b>
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	10.86	10.82
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	18.95	21.46
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	6.43	8.02
	<b>Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183  
Telp.: (0274)4342234, fax.:(0274)4342230  
*Homepage:*<http://yogyakarta.bps.go.id>, *e-mail:*[bps3400@bps.go.id](mailto:bps3400@bps.go.id)